

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KARYA ILMIAH

Abdullah, Rozali, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Asy'ari, Hasyim, 2019, *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media.

Banakar, Reza, 2015, *Normativity in Legal Sociology: Methodological Reflections on Law and Regulation in Late Modernity*, New York: Springer.

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawati H dan Alia Harumdani W, 2012, Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3.

Buck, Crhistopher G., *Judicial Activism*, dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, 2007, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, California, SAGE Publication.

Bungamayang, Adam Mulya, 2019, Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dalam Menjamin Hak Konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Tesis.

Canon, Bradley C., 1983, "Defining the Dimensions of Judicial Activism", *Judicature*, Volume 66, Issue 6.

Center For Electoral Reform (Cetro), 2010, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA*.

Faiz, Pan Mohammad, 2016, Dimensi *Judicial activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2.

Fatah, Eep Saifullah, 1997, *Evaluasi Pemilu Orde Baru, Mengapa 1996-1997 terjadi berbagai kerusuhan?*, Jakarta-Bandung, Laboratorium Fisip UI dan Mizan.

Fuady, Munir, 2009, *Konsep Negara Demokrasi*, Jakarta, Retika Aditama.

Gaffar, Affan, 2000, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Gamer, Bryan A. dan Henry Campbell Black, 2004, "*Black's Law Dictionary*", Minnesota, West Group.

Hastuti, Sri, 2005, Pengalaman Indonesia Menuju Demokrasi: Beberapa Catatan Atas Pemilihan Umum Pada Masa Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Orde Baru, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 28.

Hoesein, Zainal Arifin, 2010, Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6.

Hutapea, Bungasan, 2015, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 4, No. 1.

Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda.

Jennifer, Graceyana, Jenaya Adra Rumondor dan Ryan Giovvani Christianto, 2022, Kedudukan Bawaslu dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu: Perspektif *Electoral* dan *Constitutional Democracy*, *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1.

JR, G. Powell dan Bingham, 2000, *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, New Haven, Yale University Press.

Jurdi, Fajrurahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana.

Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Bandung, Penerbit Nusa Media.

Kmiec, Keenan D., 2004, The Origin and Current Meanings of Judicial Activism, *California Law Review*, Vol. 92, No. 5.

Latipulhayat, Atip, 2017, Mendudukan Kembali *Judicial activism* dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3.

Mahardika, Ahmad Gelora, 2021, Diskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih Serta Penyelesaiannya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3, No. 1, November.

Mahardika, Ketut Arya, 2000, *Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Jakarta, Gramedia.

Marshall, William P., 2002, Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism, *University of Colorado Law Review*, Vol. 73, No. 4.

Martitah, 2016, Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature?*, Jakarta, Konstitusi Press.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV Ganda, Cetakan 3, Prenada Media Group, Jakarta.

MD, Moh. Mahfud, 2008, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan didepan Komisi III DPR RI pada saat fit and proper test hakim konstitusi.

MD, Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Jakarta, Rajawali Press.

MD, Moh. Mahfud, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers.

- Mochtar, Zainal Arifin, 2021, "*Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial activism vs Judicial Restraint*", Ed 1, Cet 1, Depok, Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J., 2000, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noviati, Cora Elly, 2013, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2.
- Nurhasan, 1999, *Pemilu Jurdil: Pengalaman dan Standart Infemasional*, Jakarta, PIRAC dan The Asia Foundation.
- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Prasetio, Teguh dan Maharani Nurdin, 2021, Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Perizinan Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2.
- Prihatmoko, 2005, "*Pemilihan Kepala Daerah Langsung*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem, dan Problematika di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, Hendri Darma, 2019, "Alternatif konsep Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024," *Pemuliaan Hukum* 2, no. 2: 60-61.
- R., Harmoko, & Afif, Z. 2021. Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). *Jurnal Pionir*, 7(1), 54–64.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas Gramedia.

Rahmatullah, Indra, Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies): Konsep dan Aktualisasnya dalam Hukum Indonesia, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 3, 2021.

Rasyid, Raihan A., 1992, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Silaban, Jane Theresia, Yuwanto, dan Lusia Astrika, 2013, Persepsi Mahasiswa FISIP Undip terhadap Demokratisasi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3.

Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Widya.

Umar, Hasbi, 2008, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD, *Jurnal Innovatio*, Vol. 4, No. 14.

Unger, Roberto M., 1999, *Gerakan Hukum Kritis (Critical Legal Studies)*, terjemahan Ifdhal Kasim, Elsam, Jakarta.

Widodo, Heru, 2018, “*Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di Mahkamah Konstitusi*”, Jakarta, Konstitusi Pers.

Widyastuti, Retno, 2022, *Rekonseptualisasi Ambang Batas Pengajuan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Tesis.

Windasari, 2023, Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum dan Inkonsistensi, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 56/PUU-XVII/2019